

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG *ḤADĀNAH*

A. Pengertian *Ḥadānah* secara umum

Ḥadānah berasal dari kata “*ḥiḍān*” artinya lambung. Sebagaimana juga kata *حُضْنُ الحَطَائِرِ بِيضُهُ* Artinya : burung itu mengepit telur dengan sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengepit anaknya.¹

Ḥadānah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau dipangkuan.² Menurut Muhammad Bin Ismail Salah Al-Amir Al-Kahlani atau yang disebut dengan nama Sa’ani, mengartikan *ḥadānah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.³

Menurut para ahli fiqih *ḥadānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz* tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakitinya

¹. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1980), cet ke 14, 173

². DEPAG RI, *Ilmu Fiqih*, direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta, 1984/1985, jilid 2, 2006.

³ As-San’ani, *Subulus Salam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), cet ke 3, 37.

demikian tidak menutup kemungkinan isteri turut membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi keluarga tersebut, karena hal itu yang terpenting adalah kerjasama dan saling membantu antara suami isteri dalam memelihara anak tersebut sampai berdiri sendiri atau dewasa.

1. Pengertian *Ḥaḍānah* menurut Kompilasi Hukum Islam

Pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) terdiri dari dua kata adalah, kata “pemelihara” dan kata “anak”, pemeliharaan berasal dari kata “pelihara” yang memiliki arti jaga, rawat. Sedangkan kata pemeliharaan berarti proses, cara, perbuatan, memeliharakan, penjagaan, perawatan, pendidikan.⁶

Menurut Yahya Harahap, pemeliharaan adalah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya, serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tua.⁷ Jadi pemeliharaan anak tersebut meliputi pengawasan, pelayanan dan pembelanjaan dalam arti yang luas. Pengawasan berarti membentuk lingkungan anak dalam suasana yang sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga anak menjadi manusia yang memiliki jiwa sosial. Pelayanan berarti menanamkan rasa kasih sayang orang

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) cet ke 2, 661

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading, 1975), cet ke 1, 204

Namun biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, selain itu juga orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa, dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban orang tua tersebut.

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) batas usia anak yang wajib diasuh adalah yang belum mencapai usia 12 tahun dan belum dapat mengurus dirinya sendiri sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental, selain itu anak yang telah melangsungkan perkawinan telah dianggap dewasa, dan pada masa tersebut orang tua tidak berkewajiban memberikan pemeliharaan dan nafkah kepada anak. Begitu juga pasal 156 point a menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 point c dinyatakan apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.

seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada, serta pinggulnya.¹⁰

Ḥaḍānah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan.¹¹ *ḥaḍānah* juga berarti “di samping” atau berada “di bawah ketiak”. Sedangkan secara terminologis, *ḥaḍānah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.¹²

Dalam kajian fiqih, pemeliharaan anak biasa disebut dengan *ḥaḍānah* yang berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.¹³

Para ulama fiqih mendefinisikan *ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1980), cet ke 14, 173.

¹¹ DEPAG RI, *Ilmu Fiqih*, direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta, 1984/1985, jilid 2, 2006.

¹² Aminur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 293

¹³ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 67

tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan memeliharanya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya baik fisik maupun mental atau akal, supaya menegakkan kehidupan sempurna dan bertanggung jawab”.

c. Menurut Qalyubi dan Umairah :¹⁸

الْحَضَانَةُ حِفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِيلُ بِأُمُورِهِ وَتَرْبِيَّتُهُ بِمَا يُصْلِحُهُ

Artinya : “*ḥaḍānah* adalah menjaga anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal yang baik”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *ḥaḍānah* adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum mumayyiz supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan tanggung jawab. *Ḥaḍānah* diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan, yang dimaksud mendidik dan memelihara disini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.¹⁹

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *ḥaḍānah* merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam *ḥaḍānah*, maka yang diutamakan adalah hak anak.²⁰

¹⁸ Syaikh Al-Qalyubi Wa Al-‘Umairah, *Al-Māḥalli Juz IV*, (Kairo: Dar Wahya Al-Kutub, 1971), 88.

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 391.

²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islāmi Wa Adillātuhu Juz VII*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984), 279.

hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqh. Barulah setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Impres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI, masalah *ḥaḍānah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan meyelesaikannya.²³

B. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Para ulama sepakat bahwa pemeliharaan anak itu adalah wajib, sebagaimana wajib memelihara selama dalam pernikahan, adapun dasar hukum dari *ḥaḍānah* atau pengasuhan anak adalah surat At-Tahrim ayat 6 :²⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : *“hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.

Yang dimaksud dengan memelihara keluarga pada ayat di atas yakni mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim yang berguna bagi agama.²⁵

²³ Aminur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 298-299

²⁴ Slamet Abidin, dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 171.

Dan dasar hukum *ḥaḍānah* yang lain sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 233 :²⁶

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, adalah bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Maksud dalil di atas adalah bahwasannya orang tua berkewajiban untuk menyiapkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya serta kesehatan baik secara fisik maupun psikis, karena masa-masa itu lah sangat

²⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) 392-393.

²⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 149.

- d. Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik.
- e. Beragama Islam.³¹

Fuqaha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya anak diasuh oleh non-muslim.³² Ulama Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hambali mensyaratkan bahwa pengasuh harus seorang muslim atau muslimah, karena orang non Islam tidak punya kewenangan dalam mengasuh dan memimpin orang Islam, di samping itu dikhawatirkan juga pengasuh akan akan menyeret anak itu masuk ke dalam agamanya. Akan tetapi ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki tidak mensyaratkan pengasuh itu seorang muslimah, jika ia wanita. Alasan mereka adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyuruh memilih pada anak untuk berada di bawah asuhan ayahnya yang muslim atau pada ibunya yang musyrik, tetapi anak itu memilih ibunya. Lalu Rasulullah SAW bersabda :

³³ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَعَمَّالَتِ الصَّبِيَّةِ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا. رواه ابو داود

Artinya : “*Ya Allah, tunjuki anak itu, condongkan hatinya kepada ayahnya*”.
(HR. Abu Daud).

Dalam hal pengasuh anak adalah laki-laki, timbul pertanyaan apakah disyaratkan ia seorang muslim. Ulama Madzhab Hanafi mensyaratkan pengasuh laki-laki harus sama-sama muslim dengan anak yang diasuhnya.

³¹ Satria Efendi, 172.

³² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘alā Madhāhib al-Arba‘ah*, (Beirut: Dar al-Fikr), jilid IV, 596-598.

³³ Al Maktabah Al Syamilah, *Sunan Abi Daud*, (Al-Qahirah: Daarul Fikr, 2008), juz ke 4, No. 2244, 681

Jika ada orang yang bukan muhrim bagi anak, maka itu diperbolehkan dengan syarat pengasuh tersebut memenuhi kriteria *ḥaḍānah*, yakni adanya wanita yang ikut membantu laki-laki tersebut dalam mengasuh anak.³⁶

D. Hak *Ḥaḍānah* Jika Istri *Nushūz*

Pada umumnya fuqaha sepakat bahwa ibu mempunyai keutamaan hak *ḥaḍānah*. Namun hak *ḥaḍānah* dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan si ibu telah melakukan *nushūz* terhadap suami seperti murtad³⁷, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak yang diasuhnya.³⁸ Tujuan dari keharusan tidak adanya perilaku diatas adalah dalam upaya memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak.³⁹

Di samping alasan-alasan yang dikemukakan di atas, menurut jumhur ulama isteri yang menikah lagi dengan laki-laki lain dapat menggurkan hak *ḥaḍānahnya*. Akan tetapi, jika laki-laki tersebut memiliki kasih sayang pada

³⁶ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Anak, Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi, 2004), 134.

³⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islāmi Wa Adillātuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), cet ke 3, 7306

³⁸ Ibid, 7298

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 308.

anak, maka hak *ḥaḍānah* ibu tersebut masih berlaku.⁴⁰ Berbeda dengan pendapat jumhur ulama madzhab Syi'ah Imamiyah, yang mengemukakan bahwa hak *ḥaḍānah* ibu gugur secara mutlak disebabkan perkawinannya dengan laki-laki lain, baik laki-laki tersebut memiliki kasih sayang atau tidak.⁴¹

Dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam juga mengatur syarat-syarat untuk mendapatkan hak asuh anak, yakni dalam pasal 156 poin c yang menjelaskan bahwa apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas perminmtaan kerabat yang bersangkutan

⁴⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1969), 299.

⁴¹ Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), cet ke 1, 132.

- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa fiqih tidak mengatur secara rinci tentang hal yang dapat menggugurkan hak *ḥaḍānah*. Pengguguran hak *ḥaḍānah* dapat dipahami dari persyaratan-persyaratan terhadap pemegang hak *ḥaḍānah*. Adapun alasan-alasan digugurkannya hak *ḥaḍānah* seseorang antara lain tidak bisa dipercaya, berperilaku tidak terpuji, membahayakan kepentingan anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang pengasuhan anak yang dapat dicabut oleh pengadilan apabila si isteri benar-benar telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya serta berkelakuan buruk yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan dan masa depan anak.